

**PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN
KEBUMEN JAWA TENGAH ANTARA TNI AD DENGAN
PETANI PESISIR SELATAN DALAM KONTEKS HUKUM
PERTANAHAN**

TESIS

Oleh

SUGANDI AFANDI

2102190014



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN
KEBUMEN JAWA TENGAH ANTARA TNI AD DENGAN
PETANI PESISIR SELATAN DALAM KONTEKS HUKUM
PERTANAHAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SUGANDI AFANDI
2102190014



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sugandi Afandi

NIM : 2102190014

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan dalam Konteks Hukum Pertanahan”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di universitas lain, kecuali pada bagian - bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal

Jakarta, 3 Juli 2023



Sugandi Afandi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN
JAWA TENGAH ANTARA TNI AD DENGAN PETANI PESISIR SELATAN
DALAM KONTEKS HUKUM PERTANAHAN

Oleh:

Nama : Sugandi Afandi
NIM : 2102190014
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aartje Tehupeiry, SH., M.H
NIDN. 0314086404

Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H, M.Kn., M.Sc
NIDN. 0305046406

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Wiwik Sri Widiana, SH., M.H
NIDN:0327096504

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA
NIDN. 0320116402



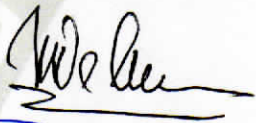


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 3 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Sugandi Afandi
NIM : 2102190014
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH ANTARA TNI AD DENGAN PETANI PESISIR SELATAN DALAM KONTEKS HUKUM PERTANAHAN” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc	Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugandi Afandi

NIM : 2102190014

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul :

Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 3 Juli 2023



Sugandi Afandi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan khendak-Nya, akhirnya tesis yang berjudul “*Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNIAD Dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan*” dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini menyoroti konflik pertanahan di Kebumen antara TNI AD dan petani. Konflik disebabkan ketidakpastian hukum dalam hak atas tanah sehingga terjadi saling klaim, tidak ada kejelasan batas-batas tanah, dan tidak maksimalnya sistem pendaftaran tanah di Kebumen. Penulis bersyukur banyak pihak yang membantu untuk memberikan data dan informasi sehingga tesis ini ditulis berdasarkan fakta di lapangan.

Penulis menyadari tidak mudah untuk menggali informasi dan mencari data apalagi kasus sengketa tanah sangat sensitif. Aparat desa tidak mau dimintai keterangan karena menganggap situasi sudah kondusif dan tidak ingin memanas. Begitupula penulis mengalami kendala untuk mendapatkan informasi dari TNI AD sehingga upaya untuk keseimbangan informasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1, dan Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc., selaku dosen pembimbing 2, serta dosen penguji yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih an penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu

1. Edward Sirait, S.E, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia
2. Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia

5. Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H., dan Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc selaku pembimbing pada ujian penelitian proposal, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, petani di Desa Ambalsari, pejabat BPN Kebumen, dan Bupati Kebumen periode 2019-2021 Yazid Mahfudz, yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua, Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Bambang Dwiana, S.sos. MM, dan teman-teman di Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Kendati demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi dibidang hukum.

Jakarta, 3 Juli 2023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka dan Konsep	
1.4.1 Kerangka Teori	10
1.4.2 Kerangka Konsep	23
1.5 Metode Penelitian	

1.5.1 Jenis Penelitian	26
1.5.2 Metode Pendekatan	26
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.5.4 Metode Analisis Data	29
1.5.5 Lokasi Penelitian	30
1.5.6 Orisinalitas.....	30
1.6 Sistemika Penulisan	38
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Agraria Nasional Indonesia.....	38
2.2 Konsepsi Hukum Tanah Nasional.....	44
2.3 Asas-asas Hukum Tanah Nasional.....	47
2.4 Tanah/Agraria	56
2.5 Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	58
2.6 Konflik Pertanahan	66
 BAB III PENYEBAB KONFLIK PERTANAHAN ANTARA TNI ANGKATAN DARAT DENGAN PETANI PESISIR SELATAN DI KEBUMEN, JAWA TENGAH	
3.1 Hasil Penelitian	74
3.1.1 Profil Kabupaten Kebumen.....	74
3.1.2 Status Tanah Di Kebumen, Jawa Tengah	82
3.1.3 Faktor Penyebab Konflik Pertanahan TNI AD dengan Petani Pesisir	84
3.2 Analisis.....	98

**BAB IV UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
ANTARA TNI ANGKATAN DARAT DENGAN PETANI
PESISIR SELATAN DI KEBUMEN, JAWA TENGAH**

4.1 Hasil Penelitian	109
4.1.1 Penyelesaian Konflik Non Litigasi	114
4.1.2 Penyelesaian Konflik Litigasi	126
4.2 Analisis.....	133

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	137
5.2 Saran	137

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145
---------------------------	-----

LAMPIRAN	146
-----------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kecamatan Kabupaten Kebumen

Gambar 2 : Luas Wilayah Kebumen, Jawa Tengah, pada 2013

Gambar 3: Lahan Kering Untuk Pertanian

Gambar 4 : Lahan Kering Bukan Untuk Pertanian

Gambar 5 : ilustrasi Gambaran di Urut Sewu



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Subtansi Penelitian

Tabel 2 : Konsepsi Pertanahan Nasional

Tabel 3 Kronologis Konflik Pertanahan TNI Angkatan Darat
dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen Jawa Tengah



ABSTRAK

Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan.

Konflik pertanahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan petani pesisir selatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sudah berlangsung lama. Konflik pertanahan yang kerap berujung bentrok dan ada korban luka terutama petani. Konflik yang berlarut-larut karena minimnya sosialisasi pendaftaran dalam hak atas tanah sehingga yang terjadi adalah masing-masing pihak saling klaim. Sengketa tanah di Kabupaten Kebumen memberikan gambaran bagaimana sistem administrasi pertanahan yang tidak rapi. Kondisi ini mungkin terjadi di daerah lain. Adapun teori hukum yang dipakai adalah penelitian adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls. Kedua teori ini masih relevan untuk menggambarkan persoalan konflik pertanahan di Kabupaten Kebumen. Kepastian hukum dan keadilan, tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan lahir keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta pada konflik pertanahan. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Selain itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yang dilengkapi data primer sebagai pendukung data sekunder, kemudian juga data hukum tersier.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan penyebab konflik pertanahan adalah ketidakpastian hukum pada hak atas tanah, dan upaya-upaya penyelesaian konflik secara non litigasi, belum sepenuhnya memberikan solusi. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik didorong untuk menggunakan jalur litigasi atau pengadilan termasuk arbitrase untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang tanah dan memasifkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), karena banyak tanah di Kebumen belum bersertifikat.

Kata kunci: Konflik Pertanahan, TNI Angkatan Darat, Petani Pesisir Selatan, kepastian hukum, keadilan, litigasi.

ABSTRACT

The Settlement of Land Conflict in Kebumen Regency, Central Java Between the Indonesian Army and South Coastal Farmers in the Context of Land Law.

The land conflicts between the Indonesian National Army and south coast farmers in Kebumen Regency, Central Java, had been going on for a long time. The land conflicts that often lead to clashes and injuries, especially farmers. The protracted conflict was due to the absence of legal certainty in land rights so that what happens was that each party claims each other. Land disputes in Kebumen District illustrated how the land administration system was not neat. This condition may occur in other areas. The legal theories used Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice. Both theories were still relevant to describe the issue of land conflicts in Kebumen Regency. Legal certainty and justice were inseparable. With legal certainty, justice would be born.

The method used in this research was evaluative research, where researchers collected various information and facts on land conflicts. For data analysis, the method was normative juridical analysis. Data collection techniques were observation and interview. In addition, also used secondary data, which was complemented by primary data as secondary data support, then also tertiary legal data.

From the results of this research, it was concluded that the cause of land conflicts was legal uncertainty in land rights, and non-litigation conflict resolution efforts had not fully provided solutions. Therefore, conflict resolution was encouraged to use litigation or court channels including arbitration to obtain legal certainty. Then encourage the government to conduct land re-measurement and intensify the complete systematic land registration (PTSL) program, because many lands in Kebumen had not been certified.

Keywords: Land Conflict, Army, South Coastal Farmers, legal certainty, justice, litigation